



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN WIJANA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 184911

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.161.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 271 m²/45 m² di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 861.000.000
2. Tanah Seluas 100 m² di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 100 m² di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 700 m² di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 435.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
5. MOBIL, HONDA HONDA CITY Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 262.404.685



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.873.404.685
III. HUTANG	Rp.	115.398.749
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.758.005.936

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.